Konsorsium PERMAMPU

Suara PERMAMPU

Perempuan Sumatra, Otonom, Sehat, Kreatif

Newsletter VII
Januari - Juni 2018









Kementerian PPN/ Bappenas

MAMPU
Kemitraan Australia - Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Konsorsium PERMAMPU

Konsorsium PERMAMPU

Suara PERMAMPU

Perempuan Sumatra, Otonom, Sehat, Kreatif

Pemimpin Redaksi	Dina Lumbantobing	Kontributor	Direktur Eksekutif
Sekretaris Redaksi	King Ronald Silalahi		Koord Program
Editor Tulisan	Dina Lumbantobing		Staf Lapang Lembaga Anggota

SEKRETARIAT PERMAMPU

Jl. Pancur Siwah No 1G Padang Bulan KM 8 Medan 20142 - Sumatera Utara
e-mail : konsorsiumpermampu@gmail.com Telp/Fax. 061-8361102
Facebook: PermampuConsortium www.permampu.org

Perempuan Sumatra, Otonom, Sehat, Kreatif

Selamat bertemu kembali.

Dalam periode ini, seluruh anggota PERMAMPU bergiat melanjutkan upaya **Pendidikan Kesehatan Tubuh dan Reproduksi Untuk Anak melalui Keluarga Peduli HKSR**. Kriteria dibangun dan pemilihan keluarga dilakukan secara partisipatoris dengan melibatkan para pihak berkepentingan. Dengan terpilihnya Keluarga HKSR, diharapkan seluruh anak dan keluarga akan lebih paham dan sadar mengenai HKSR mereka, dan terhindar dari berbagai bentuk kekerasan seksual maupun pelanggaran HKSR pada umumnya. Salah satu champion yang berasal dari SUMBAR kami tampilkan dalam Cerita Perubahan.

Sementara itu **OSS&L yang sebenarnya adalah arena yang melibatkan semua pihak untuk memberi pelayanan & pendidikan HKSR yang sesuai Standard Pelayanan Minimum (SPM) Kesehatan**, juga telah mulai berjalan melalui Puskesmas. Upaya melalui Puskesmas adalah langkah awal untuk memastikan perempuan semua umur khususnya remaja dan kelompok umur yang enggan, takut, segan ke PUSKESMAS maupun tempat pelayanan kesehatan lainnya; dapat dilayani dan dididik secara terpadu dan rahasia; dengan melibatkan semua pihak yang peka gender dan HKSR.

Masa Pilkada juga telah menggiatkan seluruh anggota Permampu untuk melakukan pendidikan politik, bukan sekedar pendidikan pemilih; bahkan hingga menjaring 824 perempuan potensial yang dimaksudkan untuk menduduki posisi kepemimpinan di arena public termasuk sebagai pelaksanana pemilihan. Ini adalah **bentuk nyata dari Pusat Pembelajaran Perempuan Potensial (4Ps-for Peace)** yang dilakukan secara berkesinambungan tanpa perlu bernaung di bawah satu arena, tetapi melalui pendidikan-pendidikan kritis yang terlaksana secara regular, maupun kursus yang dilaksanakan secara temporer. Upaya khusus untuk lebih cepat melaksanakan kegiatan dalam tahun ini juga diupayakan melalui **asistensi** yang dilaksanakan kepada sebagian anggota Permampu yang membutuhkan, demikian pula halnya dengan monitoring.

SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang terdiri dari 17 tujuan untuk mengakhiri kemiskinan juga secara khusus menjadi salah satu kegiatan utama dalam bulan Juni ini. Konsultasi Daerah telah dilakukan di 3 Kabupaten (Padang Pariaman, Lampung Timur & Dairi) serta Propinsi Aceh. Konsultasi ini akan menukik ke penguatan komunitas di sepanjang 2018 – 2019, sehingga kelompok dampingan Permampu mampu mengadvokasi kepentingan perempuan, khususnya melalui tujuan 3 (Kesehatan), 4 (Pendidikan khususnya Pendidikan Sepanjang Hayat) dan 5 (Kesetaraan Gender & Penguatan Perempuan). Seluruh kegiatan Permampu dikawal oleh Pengurus dan Pengawas yang secara khusus mempertajam **AD/ART serta Pedoman Perilaku**, demikian pula upaya penguatan kapasitas personil dan perempuan akar rumput (FKPAR).

Demikian laporan singkat dari Sekretariat Permampu. Sebagai tambahan, Sekretariat kita pindah ke alamt baru sebagaimana dimuat di kop Newsletter ini.

Salam solidaritas.
Dina Lumbantobing.
Koordinator Pelaksana Permampu.

DAFTAR ISI

1. Editorial
2. Salam Redaksi
3. Akuntabilitas
9. FKPAR
17. FMS
23. Cerita Perubahan

Kementerian PPN/ Bappenas
Australian Government
MAMPU Kemitraan Australia - Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Konsorsium PERMAMPU

Capaian Permampu

Periode 1 Januari 2018 s/d 30 Juni 2018

Dalam periode ini, Konsorsium Permampu telah melaksanakan berbagai kegiatan yang merupakan bagian dari Rencana Kerja Tahunan 2018. Adapun indikator capaian untuk semester ini adalah sebagai berikut:

Indikator	Jumlah	Jumlah anggota	
		Perempuan	Laki-Laki
1. Jumlah kelompok ekonomi • Jumlah kelompok (unit) • Total saham • Total pinjaman beredar	549 Rp. 40.939.392.282 Rp. 43.153.969.980	20.245	0
2. Jumlah perempuan muda yang dilatih dan aktif	26 Kab/Kota	3.446	0
3. Terbentuk FKPAR (Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput) di tingkat Kabupaten/Kota	26 Kab/Kota	20.245	0
4. Terbentuk FMS (Forum Multi Stakeholder) di Kab/Kota (kab, pr, lk)	26 Kab/Kota	403	197
5. Jumlah Femokrat (Perempuan Peka Gender di Birokrat/Pejabat Publik)	26 Kab/Kota	288	0
6. Jumlah Perempuan korban KtP yang ditangani langsung	26 Kab/Kota	283	0
7. Jumlah perempuan difasilitasi mengakses layanan kesehatan	26 Kab/Kota	554	0
8. Jumlah aparatur Pemerintah terlibat dalam program tingkat Kabupaten/Kota	26 Kab/Kota	453	388
9. Jumlah tokoh adat yang difasilitasi	26 Kab/Kota	13	65
10. Jumlah tokoh agama yang difasilitasi	26 Kab/Kota	50	120
11. Jumlah perempuan disabilitas yang dijangkau	26 Kab/Kota	9	0

Penjelasan Capaian Periode 1 Januari - 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut :

1) **Meningkatnya kekuatan ekonomi kelompok perempuan** melalui pendampingan Credit Union (CU) dan Koperasi terus meningkat dari 501 kelompok (Januari 2018) menjadi 549 kelompok (Juni 2018) yang tersebar di 31 Kabupaten/Kota wilayah dampingan di Sumatera.

   Jumlah saham dari Rp. 36.665.057.964 (Jan 2018) juga meningkat menjadi Rp. 40.939.392.282 (Juni 2018); sementara pinjaman beredar dari Rp. 40.133.481.627 (Jan 2018) menjadi Rp. Rp. 43.153.969.980 (Juni 2018).

   Jika dibandingkan dengan Juni tahun 2017, jumlah anggota bertambah sebesar 19 %, pertambahan saham anggota mencapai 28 % dan peningkatan pinjaman mencapai 21 %. Upaya untuk meningkatkan penguatan ekonomi dilaksanakan melalui pendampingan dalam pembukuan dan pengorganisasian kelompok. Permampu juga terus memotivasi perempuan akar rumput untuk berani memulai usaha dan juga memanfatkan pinjaman di CU untuk memulai usaha mikro khas perempuan baik usaha produksi pangan, usaha dagang, dan pertanian.

2) **Pada tanggal 12-14 Februari 2018,** Permampu menyelenggarakan peningkatan kapasitas Permampu dengan tema "Kepemimpinan Perempuan Feminist untuk Advokasi HKSR & Keberlanjutan Penguatan Perempuan Akar Rumput" di Hotel Four Point, Medan. Acara ini diikuti 44 orang (42 perempuan & 2 laki-laki) dengan peserta dari perwakilan organisasi anggota Permampu.

   Seluruh proses pelatihan difasilitasi Dina Lumbantobing dan Lusi Herlina dan dibantu oleh DE/Pengurus Permampu. Kegiatan ini ditujukan untuk memperkuat perspektif organisasi anggota Permampu agar mampu melakukan analisis gender, HKSR, dan analisis kekuasaan dalam kerangka program Permampu serta berbagi pengalaman dalam penguatan ekonomi dan politik perempuan akar rumput.

   Dalam kegiatan ini narasumber, Lies Marcoes memberikan pendalaman analisis HKSR dan analisis kekuasaan untuk memperkuat implementasi program Permampu. Selain itu, hadir 3 orang pengurus CU Pesada Perempuan & CU Faolala Perempuan Nias sebagai nara sumber yang berbagi pengalaman dalam melakukan penguatan ekonomi (CU) untuk perempuan akar rumput; yaitu: Rouli Manurung, Rismawati Bancin, dan Amani Lahagu.

3) **Pada tanggal 17-18 April 2018,** Permampu menerima kunjungan Tim Mampu terdiri dari Ayu Bulan & Astuti (MAMPU) serta Enda Fehulisa dari DFAT-Australia. Kunjungan diawali dengan diskusi dengan kelompok perempuan PESADA di Desa Tumori, Kab. Nias Barat pada tanggal 17 April 2018. Dalam diskusi terungkap manfaat yang dirasakan anggota CU sejak bergabung ke CU Pesada FAOLALA. Perubahan yang dirasakan adalah menjadi paham akan hak-hak perempuan, kesetaraan dengan laki-laki, memiliki tabungan dan

dapat mengembangkan usaha, sehingga bisa menyekolahkan anak hingga ke Perguruan Tinggi.

Pada tanggal 18 April 2018, kunjungan dilanjutkan dengan audiensi dengan Sekda Nias Barat yang dihadiri juga oleh Pimpinan Gereja ONKP, FMS dan Pembatra. Topik audiensi Tim PERMAMPU dengan Sekretaris Daerah Kab. Nias Barat menyangkut pentingnya kebijakan pemerintah daerah untuk pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan. Dalam diskusi dibahas juga usulan FMS untuk melakukan penyederhanaan perkawinan adat untuk mengantisipasi kekerasan terhadap perempuan di keluarga. Gagasan ini sebelumnya telah dibahas bersama Lembaga Budaya Nias di Kab. Nias Barat. Pemda Nias Barat juga menyambut baik rencana pemberian penghargaan Desa Peduli HKSR, dimana PESADA diminta bekerja sama dengan PKK dan OPD Pemerintahan Desa untuk merealisasikan ide tersebut.

Di akhir kunjungan Tim MAMPU bertemu dengan Pembatra dan menyaksikan penandatanganan MoU PESADA dengan Kementerian Agama Kab. Nias Barat untuk pemenuhan HKSR Perempuan.

4) **Pada tanggal 20 April 2018,** Permampu melakukan *Participatory Analysis and Reflection* (PAR) di Hotel Garuda Plaza Medan yang difasilitasi oleh Ayu Bulan & Astuti (MAMPU) serta Enda Fehulisa dari DFAT-Australia.

Dalam kesempatan tersebut fasilitator menjelaskan bahwa PAR adalah alat bagi bagi Mampu dan mitra Mampu (dalam hal ini Permampu) untuk melakukan evaluasi, analisis, dan refleksi bersama untuk mendapatkan informasi mendalam tentang capaian-capaian yang diraih dan kendala-kendala yang dihadapi oleh PERMAMPU yang mungkin saja luput untuk dilaporkan secara tertulis.

Dalam prosesnya, teridentifikasi bahwa dalam periode bulan Juli – Desember 2017 hasil yang paling menonjol adalah diperolehnya data dan temuan survey permasalahan gizi perempuan dan perempuan muda, meningkatnya akses perempuan terhadap layanan kesehatan reproduksi dan terpilihnya Keluarga Peduli HKSR sebagai *role model* di komunitas.

Tantangan eksternal yang paling menonjol dihadapi oleh Permampu adalah seringnya mutasi di Organisasi Perangkat Daerah sehingga menyulitkan dalam menindak-lanjuti target advokasi HKSR Perempuan sedangkan tantangan internal adalah manajemen personil dengan luasnya wilayah pendampingan. Berangkat dari tantangan tersebut, Permampu kemudian menyusun rencana tindak lanjut untuk mengatasi tantangan program.

Di akhir acara, Permampu menyepakati 3 cerita perubahan yang dinilai memiliki pengaruh signifikan untuk di publish ke media.

5) **Pada tanggal 8 Mei 2018,** Permampu mendapat kunjungan Kate Shanahan (Team Leader Mampu) dan Shinta (Facilitator Partner Mampu untuk Tema Kesehatan

Perempuan) di Sekretariat Permampu di Medan.

Dalam kunjungan tersebut Permampu menjelaskan perkembangan program Permampu khususnya pengalaman lapangan Pesada dalam melakukan advokasi OSS&L dan usulan penulisan kepemimpinan feminist di lembaga Permampu.

Kate Shanahan menyarankan agar Permampu memperhatikan kelompok disabilitas dan lansia dalam jangkauan PERMAMPU, meminta umpan balik dari mitra terhadap kinerja Mampu dan memperkenalkan Shinta sebagai *partner facilitator* yang mendampingi Permampu.

6) Lokalatih Pendidikan Politik & Seruan jelang Pilkada 2018

Dalam rangka memperkuat kapasitas organisasi anggota Permampu dalam inovasi 4Ps, Permampu menyelenggarakan Lokalatih Pendidikan Politik pada tanggal 16-17 Maret 2018 di Hotel Polonia, Medan.

Lokalatih pendidikan politik ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep hak politik perempuan, analisis gender terhadap visi/misi dan rekam jejak calon, menyusun *training plan* pendidikan politik, dan menjaring perempuan potensial dalam kerangka 4Ps. Lokalatih ini diikuti oleh 19 orang (17 perempuan dan 2 laki-laki) peserta dari 8 organisasi anggota Permampu.

Dari kegiatan ini, masing-masing-masing anggota Permampu diharapkan dapat melakukan pendidikan politik bagi Perempuan Akar Rumput, melakukan kontrak politik dengan kandidat dan membuat seruan *counting down* sebagai bagian pendidikan publik menjelang 27 Juni 2018 dan Pemilu 2019.

Dalam kurun waktu Maret – Juni 2018, Permampu dan anggotanya telah menerbitkan siaran pers berupa seruan setiap tanggal 27 tiap bulan menjelang Hari H Pilkada serentak. Host Permampu menerbitkan dua siaran pers yakni tanggal 27 April 2018 terbit "Pilih Calon Peduli AKI dan Kesehatan Reproduksi Perempuan & Mendukung Kepemimpinan Perempuan" dan tanggal 21 Juni 2018 tentang Enam Himbauan untuk Enam Hari Menjelang PILKADA Bersih & Damai untuk Pemilih Perempuan Cerdas di Pulau Sumatera.

7) Pertemuan Pengurus FKPAR Sumatera

Pada tanggal 24 – 26 Juni 2018, Permampu menyelenggarakan Pertemuan Pengurus FKPAR Sumatera Dampingan Permampu di Hotel Garuda Plaza, Medan. Kegiatan ini diikuti oleh 16 orang perempuan terdiri dari Pengurus FKPAR Wilayah dan Direktur Lembaga anggota Permampu.

Dalam kegiatan ini, tiap wilayah mempresentasikan perkembangan FKPAR mencakup capaian RK, tantangan dan upaya percepatan pelaksanaan RK periode Juli 2018 hingga akhir 2019 khususnya perbaikan keorganisasian, komunikasi dan koordinasi, ketersediaan data, peningkatan kapasitas dari perempuan potensial.

Permampu berharap konsolidasi FKPAR dapat semakin berkembang mulai dari tingkat pedesaan, provinsi hingga Sumatera untuk membangun gerakan politik perempuan.

Dalam pertemuan ini juga dibahas komitmen keterlibatan aktif FKPAR dalam kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs di tingkat Kabupaten/Propinsi dan rencana konsultasi daerah SDGs yang dilakukan oleh anggota Permampu.

8) **Rapat Pimpinan Permampu** terlaksana tanggal 1 dan 2 Maret 2018 bertempat di Medan. Rapat dihadiri oleh Kharaini Arifin dan Helfi Rahmawaty (Pengurus) dan Laila Noor (Pengawas), Dina Lumbantobing (Koordinator Pelaksana), Ramida Sinaga (PJ Host) dan Elpina Sipayung (GM Host PERMAMPU). Rapat dua hari ini membahas laporan capaian PERMAMPU, mereview tugas Pengawas dan Pengurus, mempelajari struktur, pembahasan AD/ART dan pedoman perilaku. Pertemuan ini telah menghasilkan Standart Operational Prosedure Pedoman Perilaku dan AD/ART.

LAPORAN KEUANGAN PROGRAM PERMAMPU

Untuk semester pertama tahun 2018, Permampu secara keseluruhan menerima dana dari mitra utama yaitu MAMPU sebesar Rp 6.611.415.833,- dengan rincian Dana Program Rp 5.710.746.620. Dana Management Overhead 2017 Rp 784.768.027 dan Dana Management Overhead 2018 Rp 115.901.186.

Pada semester ini, Permampu telah menyerap dana mencapai 41,42 %. Lembaga yang paling tinggi serapannya adalah Flower Aceh yang mencapai 49,10% sedangkan lembaga yang mesti meningkatkan serapannya adalah WCC Palembang yang menyerap 27,22 %. Beberapa RK semester ini yang telah dilaksanakan oleh Permampu seperti: Pertemuan tahunan pengurus FKPAR, Pendidikan Politik, Peningkatan Kapasitas Permampu, Pemilihan Keluarga Peduli HKSR, Konsultasi Daerah TPB/SDGs, dan lain-lain.

Lembaga	Budget	Realisasi	Sisa	Serapan (%)
Flower	630.420.040	309.559.376	320.860.664	49,10
Pesada	869.164.000	311.921.541	557.242.459	35,89
PPSW	555.055.000	235.288.400	319.766.600	42,39
LP2M	504.905.000	225.665.925	279.239.075	44,69
APM	532.025.996	218.311.094	313.714.902	41,03
CP WCC	595.574.700	237.904.150	357.670.550	39,95
WCC Palembang	437.830.000	119.196.600	318.633.400	27,22
DAMAR	537.735.000	220.569.700	317.165.300	41,02
Host	2.049.990.000	901.748.036	1.148.241.964	43,99
	6.712.699.736	**2.780.164.822**	**3.932.534.914**	**41,42**

Photo Kegiatan Host Permampu





Kunjungan Team Leader MAMPU



Rapat Pimpinan PERMAMPU



FORUM KOMUNITAS PEREMPUAN AKAR RUMPUT (FKPAR)



FKPAR Aceh



FKPAR Aceh melakukan roadshow Kampanye IWD 2018.

FKPAR Aceh telah terbentuk di 12 Kab/Kota di Provinsi Aceh. Kepengurusan FKPAR Aceh Periode 2018-2019 diketuai oleh Cut Raihan dan Rasyidah sebagai Sekretaris. Dalam kurun waktu 2016-2017, FKPAR Aceh terlibat menjadi relawan untuk mendampingi perempuan KtP, mengadvokasi adanya anggaran P2TPA Kab. Pidie; Desa Rawang Itiek (Kab. Aceh Utara) dan Desa Alue Deah Tengoh, Desa Punge Jurong, Desa Blang Oi dan Desa Lamdom (Kota Banda Aceh) untuk program peningkatan kapasitas perempuan, HKSR dan perlindungan KtP. FKPAR Aceh juga terlibat melakukan menyampaikan aspirasi hak-hak perempuan ke dalam Pergub No 30/2017 tentang Pedoman pelaksanaan Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh, rancangan Qanun KIBBLA, dan usulan reusam tentang pencegahan perkawinan anak dan perlindungan KtP di Desa Gronggrong, Kab. Pidie.

Aksi kolektif FKPAR Aceh menyuarakan hak-hak perempuan dilakukan dalam berbagai kesempatan memperingati IWD, Kampanye Anti KtP Internasional, dan moment peringatan hari perempuan dan melakukan audiensi ke institusi pemerintah seperti DPRD, BPJS Kesehatan, dan OPD terkait. Untuk mendorong kepemimpinan perempuan, FKPAR Aceh telah mendata ada sebanyak 151 orang (8 Banda Aceh, 38 Pidie, 110 Aceh Utara) perempuan potensial yang berminat memasuki jabatan politik/publik di tingkat desa hingga kabupaten.

Pelaksanaan rencana kerja FKPAR Aceh masih menemukan tantangan seperti belum terbangun sistem komunikasi pengurus, terbatas dana organisasi, adanya prasangka negatif terhadap kepemimpinan perempuan oleh tafsir agama dan adat. Upaya percepatan yang akan dilakukan oleh FKPAR Aceh ke depan adalah memanfaatkan komunikasi *WAGs* untuk memudahkan komunikasi antar pengurus, bekerjasama dengan mitra Mampu di Aceh untuk penguatan kapasitas FKPAR, melakukan pendidikan publik tentang hak-hak perempuan di politik, dan memanfaatkan data dan temuan dalam advokasi HKSR Perempuan.

FKPAR Sumatera Utara

Dalam memperkuat konsolidasi anggota, FKPAR Sumatera Utara terus melakukan pengenalan misi dan program FKPAR kepada angggota yang terdiri dari SPUK, JarPUK, dan Kelompok CU di 14 Kab/Kota wilayah dampingan Pesada.



Penguatan kapasitas FKPAR Sumatera Utara tentang TPB dalam RAT CU.

FKPAR Sumatera Utara melaksanakan berbagai diskusi kritis tentang pemahaman UU Desa, diskusi data kemiskinan partisipatif,

SDGs khususnya Pilar Pembangunan Sosial, dan lain-lain. Anggota FKPAR berpartisipasi mengikuti Musrembang Desa dan melobby Kepala Desa agar pembangunan desa responsive gender dan HKSR Perempuan. Beberapa capaian untuk advokasi anggaran desa misalnya ada alokasi APBDesa Buluh Tellang, Kab. Pakpak Bharat untuk Pengembangan Pangan Organik Rp. 9.000.000 pada tahun 2017 dan Rp. 8.000.000 pada tahun 2018 dan juga dilakukan di 3 desa di Kab. Nias Selatan, Kab. NIas dan Kota Gunung Sitoli masing-masing sebesar Rp. 15.000.000.

Dalam rangka pemenuhan HKSR Perempuan, FKPAR Sumatera Utara mendorong anggotanya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi melalui test IVA. Pada semester satu tahun 2018 tercatat 996 orang anggota FKPAR memperoleh pendidikan dan pelayanan IVA Test di Puskesmas. Sementara itu, anggota FKPAR juga terlibat menjadi tenaga pemantau dalam Sistem Pengaduan Masyarakat di Puskesmas Batang Beruh dan Puskesmas Gunung Sitember Kab. Dairi. Sistem pengaduan masyarakat ini menjadi sarana untuk mendorong implementasi SPM Bidang Kesehatan khusus Kesehatan Reproduksi dalam kerangka OSS&L.

Pendidikan politik yang dilakukan oleh Pesada telah mengidentifikasi 340 perempuan potensial Anggota FKPAR yang berminat mengikuti seleksi/pemilihan jabatan politik/publik mulai dari Desa-Kab. Mereka tersebar di Kab Pakpak sebanyak 41 perempuan, Kab. Dairi berjumlah 55 perempuan, Kab. Humbang Hasundutan berjumlah 12 perempuan, Kab. Tapteng berjumlah 16 perempuan, Kab. Langkat berjumlah 9 perempuan, Kab. Nias berjumlah 16 perempuan, Kab. Nias Utara berjumlah 55 perempuan, Kab. Nias Selatan berjumlah 29 perempuan, dan Kota G.Sitoli berjumlah 85 perempuan. Anggota FKPAR Sumatera Utara yang menjadi Caleg dalam Pemilu Legislatif 2019 tingkat Kab/Kota berjumlah 13 orang.

FKPAR Riau



AKSI BERSAMA OBR (Dok PPSW)

Kepengurusan FKPAR Riau Periode 2018-2021 diketuai oleh Nuraini dan Khoiriah sebagai Sekretaris. Program kerja FKPAR meliputi pendataan anggota, pelatihan dasar komputer, meningkatkan partisipasi dan kepemimpinan perempuan di Musrembangdesa, pendidikan politik, dan terlibat melakukan advokasi kebijakan HKSR dan mendorong anggota untuk melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi/deteksi dini kespro.

Peringatan IWD 2018 dirayakan oleh FKPAR Riau dengan rangkaian kegiatan yang dimulai pada tanggal 7 Maret 2018 dengan melaksanakan Pertemuan Penguatan FKPAR Riau yang diikuti oleh 35 orang anggota. Kemudian di puncak perayaan IWD tanggal 8 Maret 2018, FKPAR menggelar Dialog Publik menghadirkan narasumber dari KPU dan BAWASLU Prov. Riau serta tim sukses Cagub Propinsi Riau pada Pilkada 2018. Dialog ini dilakukan sebagai media pendidikan politik dan

menyuarakan aspirasi FKPAR kepada kandidat yang maju dalam Pilkada Gubernur Riau. Seusai kegiatan tersebut, FKPAR Riau melakukan long march untuk mengkampanyekan pemenuhan hak-hak perempuan, pemenuhan HKSR perempuan, wajib belajar 12 tahun gratis dan berkualitas, kesejahteraan buruh, serta agar merealisaskan janji tanah untuk rakyat. Aksi long march dilakukan di sekitaran jalan kota Pekan Baru yang diikuti oleh 100 orang (85 Pr dan 15 Lk).

Jumlah perempuan potensial yang telah terdata oleh FKPAR Riau sebanyak 54 orang terdiri dari 40 orang di Kab. Rokan Hilir, 8 orang di Kota Pekanbaru dan 6 orang di Kab. Kampar.

FKPAR Sumatera Barat

Kepengurusan FKPAR di tingkat Provinsi Sumatera Barat telah terbentuk dan memiliki Anggaran Dasar. Pertemuan pengurus FKPAR masih sering terkendala karena jarak domisili pengurus Untuk memudahkan komunikasi pengurus yang berdomisili jarak jauh dilakukan dengan komunikasi WAG. FKPAR telah melakukan pendataan anggota untuk menghimpun data indentitas, pekerjaan, keanggotaan KPUK, jumlah keluarga, kepemilikan KIS-JKN dan pernah tidak melakukan IVA Test/Papsmear. Untuk mendukung pelaksanaan pendataan dan meningkatkan keterampilan IT, pengurus FKPAR memperoleh pelatihan dasar menggunakan computer khususnya Microsoft Word dan Excel. Dalam pendidikan politik yang dilakukan oleh LP2M, terindentifikasi sebanyak 57 orang perempuan potensial, terdiri dari 22 perempuan di Kota Padang, 17 perempuan di Kab. Padang Pariaman, dan 18 di Kab. Tanah Datar. Selain itu, anggota FKPAR juga didorong untuk mengikuti Kejar Paket B dan C dimana sejauh ini sudah ada 8 orang yang mengikutinya. Advokasi pemenuhan HKSR Perempuan oleh FKPAR Sumatera Barat diupayakan melalui advokasi peningkatan alokasi anggaran PBI-KIS Kota Padang melalui audiensi dengan pihak DPRD dan berdialog dengan Calon Walikota Pilkada Kota Padang. Sejauh ini, masih terdapat anggota FKPAR yang kategori miskin yang tidak memperoleh PBI-KIS yaitu 15 % di Kota Padang, 12 % di Kab. Padang Pariaman dan 35 % di Kab.Tanah Datar.



Dialog FKPAR Padang dengan Calon Wakil Walikota

FKPAR Sumbar turut menyuarakan pentingnya alokasi anggaran untuk P2TP2A dan ambil bagian menjadi kader pendamping jika ada pengaduan perempuan korban kekerasan. Salah satu pengurus FKPAR menjadi anggota Divisi Pemberdayaan P2TP2A Sumbar. Dalam mendorong adanya akokasi dana desa yang peka gender, anggota FKPAR di Kab. Tanah Datar berhasil memperoleh ADD dari Nagari Tanjung Bonai dan Nagari Lubuk Jantan serta dana aspirasi DPRD untuk pengembangan usaha tenun perempuan. Sedangkan di Kab. Pariaman, anggota FKPAR berhasil mengadvokasi dana desa untuk honor kader posyandu, guru TK dan guru mengaji, makan tambahan dan sosialisasi PBHS di Nagari Koto Tinggi. FKPAR Sumbar juga terlibat aktif mendorong ditetapkannya dua peraturan Nagari, yakni di Tanjung Bonai dan

Koto Tinggi mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak; Perwako Padang tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, dan MoU Puskesmas dan KUA Kec. Enam Lingkung tentang *screening* HIV bagi pasangan calon pengantin. Tantangan yang dihadapi FKPAR dalam advokasi HKSR Perempuan adalah masih lemahnya kapasitas anggota melakukan advokasi, pihak tokoh adat dan agama menganggap HKSR tabu untuk dibicarakan, serta perspektif aparatur Pemerintah Nagari yang bias jender.

FKPAR Jambi



FKPAR Jambi mengikuti Kegiatan Asistensi Permampu ke APM Jambi.

Penguatan struktur kepengurusan FKPAR Jambi dilakukan dengan mengadakan pertemuan pengurus setiap 4 bulan sekali yang diisi dengan diskusi kritis dan mempersiapkan event-event aksi kolektif memperingati hari perempuan. FKPAR mendorong anggota untuk meningkatkan kapasitas seperti terdapat 13 orang kader yang memperoleh kursus komputer dasar, 23 orang mengikuti pelatihan penulisan laporan dan pengalaman lapangan dan 25 orang telah mengikuti Pendidikan Kejar Paket. FKPAR Jambi terlibat untuk terlibat mengadvokasi untuk ketersediaan 1 dokter spesilias anak, 1 dokter spesialis anak, dan 1 spesialis penyakit dalam di RS. Kab. Merangin yang sejak 15 tahun lalu tidak pernah tersedia. FKPAR Riau juga mengikuti Gerakan Sadar Test Iva gratis yang telah menjangkau 1300 perempuan.

Selain itu FKPAR Jambi juga terlibat dalam advokasi pemenuhan HKSR Perempuan seperti mendorong peningkatan alokasi anggaran untuk P2TP2A (ketersediaan rumah aman, kendaraan operasional, tenaga psikolog dan pengacara) dan peningkatan alokasi dana desa sebesar 25 juta per tahun untuk pemberdayaan perempuan dan peningkatan gizi anak di 14 desa. Anggota FKPAR Jambi terus didorong untuk memasuki posisi jabatan publik/politik. Saat ini terdata 54 orang anggota BPD, 3 orang Kepala Dusun, dan 57 org di PPS, KPPS, Pengawas, dan Saksi. Sementara itu, untuk perempuan potensial teridentifikasi sebanyak 74 orang terdiri dari 62 orang di Kab. Merangin , 5 orang di Kab. Bungo, 7 orang di Kab. Sarolangun.

FKPAR Bengkulu

FKPAR Bengkulu telah memperbaharui kepengurusan tingkat Provinsi periode 2016-2018 terdiri dari Dewan Pengurus yang diketuai oleh Ismaida dan Dewan Pelaksana yang diketuai oleh Suhartini. Telah disepakati agenda kerja FKPAR dimasing-masing Kabupaten terdiri dari rapat pengurus, pendataan anggota, pelatihan dasar komputer, pendampingan kejar paket, dan advokasi kebijakan dan anggaran untuk pemenuhan HKSR. FKPAR Sumatera Selatan. Hingga saat ini sudah ada 373 orang dari 473 orang anggota FKPAR telah mempunyai kartu anggota. Untuk meningkatkan kapasitas anggota, FKPAR Bengkulu telah melakukan peatihan pengenalan komputer dasar diikuti oleh 15 orang pengurus dan 150 perempuan muda di Kab. Rejang Lebong, Kab. Seluma dan Kota Bengkulu.

Sementara itu , FKPAR pun mendorong anggota untuk mengikuti pendidikan formal Kejar Paket A,B dan C. Saat ini sudah ada 2 orang mengikutinya dan 31 orang yang berminat. Dalam pendidikan politik bagi perempuan CP WCC telah terjaring sebanyak 30 orang perempuan potensial anggota FKPAR terdiri dari 11 orang di Kab. Rejang Lebong, 5 orang di Kota Bengkulu dan 14 orang di Kab Seluma.



Diskusi Pendidikan Politik FKPAR di Kab. Seluma

Program kampanye dan advokasi pemenuhan HKSR yang dilakukan FKPAR Bengkulu mencakup mengadvokasi kebijakan DPRD Kab untuk meningkatkan alokasi anggaran untuk PBI -KIS, penyediaan sarana pelayanan kespro seperti USG dan rumah tunggu, serta mendorong agar dilakukan updating data penerima bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. FKPAR Bengkulu turut mendorong agar P2TP2A dapat berjalan efektif memberi perlindungan KtP. Upaya advokasi ini berhasil mendapatkan dukungan anggaran untuk rumah aman dan adanya 2 orang anggota FKPAR Bengkulu yang menjadi anggota Satgas P2TP2A.

Dalam kerangka implementasi UU Desa, FKPAR mendorong agar pembangunan desa semakin responsive gender melalui advokasi anggaran desa seperti adanya alokasi Rp. 150.000.000,- untuk pembangunan sarana air bersih di Desa Sumber Urip, Rp. 200.000.0000 untuk pembangunan fasilitas Posyandu Desa Sidoluhur, dan pengadaan dokter di Puskesmas Talang Tinggi. Selain itu, FKPAR juga ikut mendorong regulasi desa responsive gender seperti Raperdes tentang Peningkatan Usia Perkawinan Desa Sidoluhur, Kab. Seluma, Ranperdes tentang Desa Bersih dan Sehat Desa Sumber Urip, Kab. Rejang Lebong, dan Raperdes Perlindungan Lahan Pertanian dan Pangan Desa Talang Lahat, Kab. Rejang Lebong. Sementara itu di tingkat Kabupaten, FKPAR Bengkulu bersama Cahaya Perempuan WCC melakukan advokasi Perbup KIBBLARET Rejang Lebong, Perda Fasilitas Pelayanan Ibu Hamil dan Menyusui Kab Seluma Ranperbup Pencegahan Perkawinan Anak Provinsi Bengkulu.

FKPAR Sumatera Selatan



Rapat Pengurus FKPAR Sumatera Selatan

Struktur kepengurusan FKPAR Sumatera Selatan terdiri dari Badan Pengawas, Badan Pengurus dan Badan Pelaksana. Herlis Noorida, Ketua Badan Pelaksana mengungkapkan bahwa pengurus FKPAR Sumatera Selatan terus memperkenalkan organisasinya kepada kelompok dampingan dan juga tokoh masyarakat. Rapat pengurus FKPAR

biasanya dilakukan bersama dengan event tertentu dari WCC Palembang dan selebihnya berkomunikasi melalui WAGs untuk mengupdate informasi kegiatan. Untuk mendorong kepemimpinan perempuan akar rumput, FKPAR Sumsel mengidentifikasi 14 orang anggotanya sebagai perempuan potensial yang berminat mengikuti seleksi jabatan publik/politik di tingkat desa dan kabupaten. Mereka terdiri dari 7 orang di Kab. Muara Enim, 5 orang di Kota Palembang dan 2 orang di Kab. Banyuasin. FKPAR Sumsel memiliki program pendataan dan pendampingan bagi anggotanya untuk mengurus dokumen indentitas kependudukan dan catatan sipil seperti KTP, Akte Lahir dan Akte Perkawinan. Selain itu FKPAR melakukan pendataan rumah tangga miskin di kelompok dampingan untuk diadvokasi kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan bantuan sosial khususnya PBI-KIS.

FKPAR Sumsel terlibat aktif dalam kegiatan aksi kolektif mengkampneykan hak-hak perempuan dalam berbagai event peringatan terkait hari perempuan. Dalam kampanye pemenuhan HKSR, FKPAR Sumatera Selatan mendorong anggotanya untuk mengakses layanan IVA Test gratis yang disediakan oleh Puskesmas. Layanan pendidikan kesehatan reproduksi dan pemeriksaan IVA gratis ini merupakan bagian kesepakatan yang didorong oleh FKPAR dalam rangka pemenuhan HKSR Perempuan. Terkait masih rendahnyanya kesediaan perempuan ikut dalam pemeriksaan test IVA maka masih dibutuhkan pendekatan khusus dan pendidikan intens tentang kesehatan reproduksi kepada perempuan dan masyarakat.

FKPAR Lampung



Rapat FKPAR untuk Konsolidasi Pemenangan Perempuan Potensial

FKPAR Lampung merupakan Gerakan Perempuan Lampung yang didalamnya tergabung enam Serikat Perempuan seperti Persatuan Perempuan Lampung Timur, FAK Lampung Tengah, Serikat Perempuan Lampung Selatan, Fakta Damar Tanggamus, Kesatuan Perempuan Lampung Utara, dan Serikat Perempuan Bandarlampung. Anggotanya mencapai 3169 orang perempuan yang tersebar di 6 kab/kota, 21 Kecamatan dan 102 Desa. Pada tahun 2018, rencana kerja prioritas FKPAR Lampung diarahkan pada pendidikan politik bagi anggota, mendorong keterwakilan kader perempuan di struktur desa, penguatan ekonomi berbasis potensi local, pengelolaan CU dengan teknologi, pendaftaran organisasi dan mengembangkan metode pendidikan dan kampanye dengan media kekinian. Peran FKPAR semakin diperhitungkan oleh publik yang ditandai dengan adanya anggota FKPAR yang ditunjuk dalam Tim Koordinasi RAD TPB/SDGs di Kab. Lampung Utara (Amperawati Berangai) dan Indah Lestrasi & Alkomah di Kab. Lampung Timur.

Sejak tahun 2016, FKPAR Lampung berupaya adanya alokasi APBD untuk PBI-KIS

dengan mendorong terlibat aktif mendorong keterlibatan kelompok masyarakat dalam tim updating data penerima PBI-KIS, mendata anggota yang tergolong rumah tangga miskin dan audiensi ke Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DPRD dan BPS Tk. Kab. Dalam rangka Perlindungan KtP, FKPAR Lampung melakukan advokasi peningkatan alokasi APBD untuk P2TP2A secara berkelanjutan. Di Kab. Lampung Utara, FKPAR berhasil mendorong terbentuknya Perda No 1 tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, alokasi anggaran Rp. 60.000.000 untuk P2TP2A, Di Kab. Tanggamus, untuk tahun 2018 P2TP2A memperoleh Rp. 650 juta yang digunakan untuk kegiatan pendampingan, dan sosialisasi. Sementara di Kab. Lampung Timur, FKPAR mengkritisi turunnya alokasi APBD untuk pendampingan perempuan korban kekerasan. FKPAR Lampung juga fokus untuk mendorong meningkatkan alokasi dana desa untuk pemberdayaan perempuan, seperti yang tercapai di Desa Purwodadi-Tanggamus yang mengalokasikan Rp. 200 juta untuk pemberdayaan ekonomi mikro perempuan, Desa Taman Negeri dan Tegal Ombo untuk Penguatan Fungsi Posyandu, dan di Kab. Lampung Tengah Rp. 20 juta untuk program peningkatan keterampilan perempuan. Dalam rangka peningkatan kapasitas, anggota FKPAR terus mendorong anggotanya untuk mengikuti Pendidikan Kejar Paket, dimana sudah ada 8 orang ikut Paket A, 9 orang Paket B, dan 32 orang Paket C di Kab. Tanggamus. Selain itu juga telah teridentifikasi 104 orang perempuan potensial dari anggota FKPAR Lampung yang terdiri dari 25 orang di Kab. Lampung Utara, 9 di Kab. Lampung Timur, 13 Kab. Tanggamus. 17 Kab. Lampung Tengah, 15 orang di Kota Bandar Lampung, dan 25 orang di Kab. Lampung Selatan.



Konsultasi Daerah TPB/SDGs di Kota Padang



Pemberian Penghargaan Keluarga Peduli HKSR Kab. Seluma


Pemberian Penghargaan Keluarga Peduli HKSR dari 3 Kab. Wilayah Kerja Flower Aceh

FORUM MULTI STAKEHOLDER (FMS)



FMS Aceh



Konsultasi Daerah TPB/SDGs di Banda Aceh

Pada semester ini, FMS Kab. Aceh, FKPAR Aceh dan Flower Aceh terlibat aktif dalam advokasi mendorong penyusunan Rancangan Qanun Tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Balita Kab. Aceh Utara. Rancangan Qanun ini sudah masuk Daftar Program Legislasi DPRD Kab. Aceh Utara Tahun 2018. Pada tanggal 8 Juni 2018, anggota FMS juga mengikuti Konsultasi Publik Tujuan Pembangunan/SDGs Provinsi Aceh di Hotel Kyriad, Kota Banda Aceh. Dalam kegiatan ini peserta menyepakati Goal TPB yang prioritas dengan konteks Aceh adalah Goal 1,2,3,4,5,9,10,11,13,16. Tantangan dalam impelementasi TPB/SDGs adalah diperlukannya sinkronisisasi kebijakan daerah dan koordinasi lintas sektor. Dalam forum, Bappeda Aceh diminta untuk memastikan keterlibatan FMS dalam Tim Koordinasi Implementasi TPB Aceh.

Dalam advokasi pemenuhan HKSR Perempuan, FMS Kab. Aceh bersama Flower Aceh menggelar Diskusi Publik membahas Implementasi SPM Bidang Kesehatan. Di Kabupaten Aceh Utara dilaksanakan tanggal 11 Mei 2018 yang dihadiri oleh 36 orang (P=23 & L=13) dan di Kab. Pidie tanggal 4 Mei 2018 yang dihadiri oleh 56 orang (P=39 & L=17). Pertemuan ini merupakan kegiatan regular FMS membahas issu kritis terkait gender dan pemenuhan HKSR Perempuan. Adapun hasil diskusi berupa catatan penting mengenai kondisi dan hambatan dalam implementasi pelayanan publik bidang kesehatan meliputi minimnya alokasi dana, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan, distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih tinggi, serta mekanisme koordinasi lintas sektor yang tidak efektif. Dalam Dialog FMS, perwakilan peserta Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Bappeda di Kabupaten Pidie maupun Kab. Aceh Utara berkomitmen untuk melakukan perbaikan kualitas layanan bidang kesehatan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan melalui peningkatan alokasi dana dan kualitas SDM.

FMS Sumatera Utara

Tanggal 18 April 2018, FMS menyaksikan penandatanganan MoU antara Pesada dengan Kementerian Agama Kab. Nias Barat tentang Advokasi Pemenuhan HKSR Melalui Pencegahan Perkawinan pada Usia Dini dan Penyederhanaan Hukum Adat Nono Niha yang Peka Gender Di Kabupaten Nias Barat bertempat di Sentrum ONKP-Tugala-Lahomi, Nias Barat. Gagasan penandatangan MoU tersebut adalah bagian dari pembahasan FMS Nias Barat selama ini yang melihat pentingnya penyederhanaan hukum adat dalam pernikahan untuk mengantisipasi kekerasan terhadap perempuan yang masih terjadi di Nias. Dengan adanya MoU ini diharapkan ada upaya bersama dalam menekan angka perkawinan usia anak dan mencegah kekerasan terhadap perempuan

dalam keluarga/perkawinan.

Pada 24 Mei 2018, Pimpinan Pusat GKPPD Bapak Bishop Elzon Lingga meluncurkan Buku Pendidikan Pra Nikah dan Konseling Perkawinan di hadapan para Pendeta, Guru Kuria dan Sintua dari 11 wilayah gereja di Kabupaten Pakpak Bharat.



FMS Nias hadir dalam Penandatangan MoU Pesada dengan Kemenag Kab. Nias Barat.

Anggota FMS Kabupaten Pakpak Bharat turut hadir dalam acara tersebut dan mengharapkan melalui buku semakin berperan insitusi agama dalam melakukan pendidikan HKSR dan penghapusan KDRT bagi jemaat. Acara ini dihadiri oleh 156 orang (29 Perempuan & 127 Laki-laki). Acara peluncuran ini dirangkai dengan peningkatan kapasitas penggunaan buku dan menyepakati tindak lanjut untuk melakukan pendidikan pra nikah di gereja secara berkelanjutan.

FMS Riau

Pada tanggal 13 April 2018, FMS bersama, FKPAR dan PPSW Sumatera melakukan audiensi ke Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru untuk membahas mengenai upaya percepatan pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan. Pada kesempatan tersebut, Dinas Kesehatan menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru telah menerbitkan Peraturan Walikota tentang SPM Bidang Kesehatan. FMS Pekan Baru berencana akan melakukan audiensi kembali untuk menjajaki kerjasama dalam monitoring dan evaluasi implementasi Perwako SPM Kesehatan tersebut.

Pada tanggal 28 Mei 2018, FMS dan PPSW Sumatera beraudiensi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir untuk mendiskusikan tindak lanjut hasil Survey Persoalan Gizi Perempuan dan Perempuan Muda. Menurut Dinas Kesehatan, sampel dari survey gizi yang dilakukan oleh PPSW Sumatera tidak representative mewakili populasi penduduk di kabupaten. Tim PPSW dan FMS menjelaskan bahwa metodologi survey yang digunakan mengacu pada Peraturan MenPAN RI No 13 tahun 2009 tentang Survey Pengaduan. Hasil survey ini paling tidak memberikan masukan kepada DInas Kesehatan tentang gambaran masalah kesehatan gizi perempuan di Kab. Rokan Hilir. Selanjutnya FMS berencana melakukan audiensi ke Dinas Kesehatan untuk menjajaki kerjasama melakukan monitoring dan evaluasi Peraturan Bupati tentang SPM Bidang Kesehatan Kab. Rokan Hilir.

FMS Sumatera Barat

Pada tanggal 28 Maret 2018, FMS di Kab. Padang Pariaman melakukan pertemuan menyepakati konsep layanan dan poin-poin penting dalam pengembangan layanan aduan berbasis masyarakat. Kegiatan ini diikuti oleh 12 orang (7 Pr dan 5 Lk) peserta. Rencananya konsep layanan aduan berbasis masyarakat ini nantinya akan dikembangkan Puskesmas yang berada di Kec.Enam Lingkung.

Sementara itu, FMS Kab. Tanah Datar juga melakukan pertemuan rutin pada 27 Maret 2018 yang diikuti oleh 19 orang (16 Pr dan 3 Lk) peserta. Adapun pokok bahasan dalam pertemuan ini adalah untuk membangun sinergitas program antar OPD seperti di KUA untuk mencegah pernikahan usia anak, di Puskesmas untuk melakukan screening HIV/AIDS bagi pasangan calon pengantin, di Dinsos PP dan PA untuk melakukan pendidikan kespro dan gizi bagi remaja, dan di Dinas Pendidikan untuk memasukkan materi kespro di ekstra-kurikuler sekolah.



Diskusi FMS bersama tokoh adat dan tokoh agama di Kelurahan Lambung Bukit, Padang.

FMS Kab. Padang Pariaman mengikuti Forum Konsultasi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kab. Padang Pariaman yang dilaksanakan oleh LP2M pada 4 s/d 5 Juni 2018. Forum ini diikuti oleh 60 orang peserta (perempuan 37, laki-laki 23 orang) yang terdiri dari FMS, FKPAR, perempuan muda, lansia penyandang disabilitas, Bapelitbangda, Penyedia layanan kesehatan, tokoh adat, tokoh agama, media, dan OPD terkait. Forum ini menghasilkan output berupa adanya komitmen Pemda Kab. Padang Pariaman untuk membuat RAD/*blueprint* SDGs/TPB, adanya pembelajaran kepemimpinan perempuan dan menyepakati isu-isu strategis Kab. Padang

FMS Jambi



Lokalatif FMS Kab. Soralangun

Pada tanggal 18-19 Januari 2018, APM melaksanakan Lokakarya Penyadaran gender dan HKSR yang diikuti oleh 34 orang anggota FMS Kabupaten Sarolangun (22 Pr & 12 Lk). Penyadaran gender bagi FMS ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan pengetahuan FMS agar mampu berperan dalam upaya mengadvokasi pemenuhan HKSR dan kekerasan terhadap perempuan. Di dalam lokakarya juga dipelajari hubungan HKSR dengan SDGs. Lokakarya yang difasilitasi oleh Fasilitator dalam kegiatan ini adalah Serlyeti Pulu (Konsil LSM Indonesia) dan menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan dan Bapeda Kabupaten Sarolangun. Sementara itu pada triwulan 1, FMS Kabupaten Bungo berperan aktif dalam penambahan kelompok perempuan di wilayah Bungo menjadi 5 kelompok dampingan. Selain itu FMS aktif melakukan audiensi ke kecamatan dan desa.

Pada periode ini, diskusi reguler FMS Kabupaten Merangin diikuti oleh 15 orang (10 perempuan dan 5 laki – laki). Pembahasan dalam diskusi berfokus pada pemetaan masalah, penyebab, dan usulan solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak di Kabupaten Merangin mencakup

perkawinan usia anak, minim perempuan di parlemen, IMS dan keterlibatan laki-laki dalam Program KB, dan pengangguran. Dalam pertemuan itu disepakati RTL yaitu: a) melakukan diskusi multi pihak di Kab. Merangin tentang perlunya peraturan pemda tentang pencegahan perkawinan di usia anak. Target waktu pelaksanaan adalah akhir bulan Juli 2018; b) penguatan kelembagaan perempuan ditingkat desa, ada penekanan terhadap perempuan potensial untuk bergerak di tingkat desa dalam rangka advokasi dana desa untuk pemberdayan perempuan; dan c) mendesak Bupati untuk memfasilitasi kegiatan peluncuran penggunaan buku saku pernikahan bagi petugas pernikahan Kemenag

FMS Bengkulu



Kunjungan FMS Bengkulu ke Puskemas yang mengembangkan layanan lansia

Pertemuan penguatan FMS Kota Bengkulu diikuti oleh 20 orang (P=14 & L=6) yang membahas peninjauan kembali SK Forum Kota Sehat dan Indikator Kota Sehat. FMS mengusulkan agar dalam SK tersebut diatur secara tegas upaya-upaya mengatasi persoalan kesehatan reproduksi perempuan (IVA) dan gizi dalam indikator. Selain itu, dibahas juga review MoU Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan agar Program UKS mengintegrasikan pendidikan kesehatan reproduksi. Pertemuan penguatan FMS Kab. Rejang Lebong yang diikuti oleh 20 orang (P=12 & L=8) membahas upaya untuk mengadvokasi Perbup KIBBLARET menjadi Ranperda serta menjajaki peluang kerjasama antara MUI dan BMA untuk penyadaran informasi ke tingkat sekolah di wilayah Kab. Rejang Lebong sedangkan pertemuan penguatan FMS Kab. Seluma yang diikuti oleh 21 orang (P=11 & L=10) membahas usulan program kegiatan untuk mendukung kesehatan gizi melalui APBD Kab Seluma, menyusun Raperbup tentang Tata Kelola Perbaikan Gizi Buruk dan point-point perbaikan isi pasal dalam Raperbup tentang Pencegahan Perkawinan di Usia Anak oleh Bagian Hukum Kab. Seluma. Dalam rangka meningkatkan pemenuhan HKSR di Kab. Rejang Lebong dan Kab. Seluma, FMS Bengkulu menjadi peserta aktif dalam Lokakarya Model Pelayanan & Pendidikan Terpadu, Kesehatan Tubuh & Reproduksi Perempuan dengan Program "Rumah Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Tubuh dan Reproduksi Perempuan". Di Kab Seluma tanggal 23-24 Maret 2018) diikuti oleh 19 orang (14 Pr & 5 Lk) sedangkan di Kab. Rejang Lebong pada 26-27 Maret 2018 diikuti 19 orang (14 Pr & 5 Lk). Program Rumah Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Tubuh dan Reproduksi Perempuan menjadi bagian dari OSS&L. Inovasi OSS&L ini mendapat dukungan positif baik dari Kepala Dinas Kesehatan Kab. Seluma dan Wakil Bupati Kab. Rejang Lebong. Hasil dari lokakarya adalah peserta memperoleh kesepahaman mengenai konsep penyelenggaraan OSSL&L sebagai bagian dari program dan pelayanan kesehatan dan menghasilkan draft SOP berupa pembagian

peran dan tugas dalam penyelenggaraan OSS&L yang rencananya akan digunakan untuk bahan pelatihan tenaga OSS&L. Direncanakan *piloting* OSS&L akan dilakukan di Puskesmas Babatan dan Talang Tinggi (Kab. Seluma); Puskesmas Sumber Urip dan Perumnas di (Kab. Rejang Lebong).

FMS Sumatera Selatan



Pertemuan FMS Kec. Gelumbang, Muara Enim

Pada tanggal 14 Maret 2018, WCC Palembang melaksanakan Diskusi Penguatan Peran & Advokasi FMS yang diikuti oleh 24 orang (23 Pr & 1 Lk). Kegiatan ini merupakan bagian dari assistensi yang dilakukan oleh Permampu yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bagi personil WCC Palembang untuk melakukan pendampingan penguatan FMS sebagai alat advokasi kebijakan pemenuhan HKSR Perempuan.

Pada tanggal 28 Juni 2018, dilaksanakan pertemuan FMS Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim. Pertemuan rutin ini membahas harapan dan kendala anggota FMS dalam melaksanan tugas dan fungsinya. Selain itu, teridentifikasi juga kebutuhan peningkatan kapasitas anggota FMS agar bisa melakukan advokasi pemenuhan kesehatan perempuan di kabupaten Muaraenim. Sementara pertemuan rutin FMS Kab. OKI membahas pentingnya pencegahan *stunting* di Kabupaten OKI mengingat Kab. OKI menjadi salah satu dari 100 kabupaten yang menajdi prioritas nasional untuk penanganan *stunting*. Dalam pertemuan ini, FMS menyepakati rencana kerja untuk mengantisipasi stunting.

FMS Lampung

Pada periode ini, FMS Lampung lebih banyak terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh Damar Lampung. Pada tanggal 13 Maret 2018, FMS mengikuti Dialog Politik dan Kontrak Politik dengan Calon Gubernur Lampung. Dalam event ini FMS menyampaikan pentingnya Pemenuhan HKSR melalui penyediaan layanan kesehatan yang mudah diakses oleh masyarakat. Pada tanggal 7 Juni 2018 dalam Konsultasi Publik Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs Provinsi Lampung, FMS dan Damar Lampung memberikan masukan agar draft Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs nantinya memprioritaskan Tujuan 5 sebagai arus utama dalam penyusunan RAD. Konsultasi publik RAD TPB ini diharapkan dapat membuka ruang bagi seluruh pemangku kepentingan dalam implementasi TPB di Propinsi Lampung.



Kontrak Politik dengan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Lampung

CERITA PERUBAHAN



"Motivasi yang begitu bernilai dari Flower Aceh"

Ditulis oleh: Khuzaimah, Staf Lapang Aceh Utara



Lahir di desa Blang Karieng, Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara 49 tahun silam, Nurlela biasa dipanggil Cek La, seorang istri yang ditinggal menikah lagi oleh suaminya harus berjuang hidup bersama 6 orang anak. 1 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Sebagai single parent Cek La harus memutar otak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan keahliannya yang pas-pasan dan hanya sempat mengenyam pendidikan MtsN atau setingkat SLTP. Pekerjaan Cek la sehari-hari adalah berjualan kios dan mengajar mengaji.

Cek La Pertama kali bergabung ikut menjadi dampingan Flower Aceh sejak tahun 2009. Saat itu ia sudah menjadi single parent. Dengan semangat dari teman-teman Cek La berhasil bangkit dari kesedihan dan dapat mengasuh anak-anaknya hingga dewasa. Tahun pertama menjadi anggota Cek La belum begitu aktif mengikuti kegiatan Flower Aceh karena belum tinggal menetap di Desa Blang Karieng. Di tahun kedua beliau terpilih sebagai salah seorang peserta lomba berpidato dengan tema mengangkat martabat perempuan. Dengan semangat yang sangat luar biasa akhirnya Cek La dapat meraih Juara ke II, padahal sebelumnya Cek La belum pernah berbicara didepan orang-orang ramai, apalagi untuk dinilai atau diperlombakan. Berkat pendampingan dari Flower Aceh Cek La telah menanam beberapa jenis tanaman herbal untuk obat disekitar rumahnya. Moto hidup Cek La untuk kesehatan diri dan keluarga adalah "Mencegah Lebih Baik dari pada Mengobati"

Cek La mendapat beberapa kali pelatihan dari Flower Aceh, salah satu yang sangat bermanfaat dan dipraktekkan sampai saat ini adalah bagaimana mengatur managemen ekonomi rumah tangga, mengelola dan mencatat pemasukan dan pengeluaran yang sesuai kebutuhan bukan keinginan. Dan karena kegigihannya tahun 2017 Cek La dipilih sebagai CO (Community Organizer) kelompok Desa Blang Karieng. Meskipun banyaknya tantangan dan hambatan selama menjadi CO, seperti isu miring tentang Flower Aceh, isu HKRS perempuan yang bertolak belakang dengan budaya di desanya, dan lain sebagainya. Tidak membuat Cek La goyah. Ia tetap semangat bahkan terus memotivasi kawan-kawan di kelompoknya untuk mau mengembangkan KPM melalui CU. Dan saat ini Tabungan anggota CU sudah mengalami peningkatan.

Ia juga aktif di kelompok juga aktif di posyandu, informasi tentang hak kesehatan reproduksi dan gizi bagi perempuan dan perempuan muda. Ia membagikan pengetahuannya kepada keluarganya sendiri juga kepada masyarakat. Setiap ada pertemuan dalam kegiatan posyandu dan kegiatan-kegiatan gampong, Cek La mensosialisasikan tentang dampak menikahkan anak dibawah umur, padahal di desa nya masih kuat anggapan tentang setiap anak perempuan yang tidak sekolah lagi baiknya menikah saja walau usianya masih 15 atau 18 karena kalau tidak menikah akan jadi perawan tua. Informasi tentang Kesehatan Reproduksi juga Cek La bagikan ke tokoh-tokoh agama pada saat kegiatan kelompok pengajian di meunash desanya. Hasilnya pandangan dari tokoh agama sudah mulai baik.

"Perjuangan Mendapatkan Hak Waris Tanah"

Ditulis oleh: Amani Lahagu, Staf CU Pesada Faolala Perempuan Nias

Nama saya Fatimani Gulo, lahir di Desa Simaeasi- Nias Barat pada tanggal 7 Desember 1970. Saya berumur 30 tahun dan anak tunggal. Sejak kecil saya telah diurus diurus oleh Mama Sakhi (saudara Bapak saya) karena orangtua meninggal sejak saya masih anak-anak. Orang tua meninggalkan warisan berupa lahan kebun karet kepada saya yang cukup luas, yang selama ini dikelola oleh Mama Sakhi dan sebagian hasilnya diserahkan kepada saya. Ini berlangsung cukup lama, dan kehidupan saya berjalan dengan baik.



Tahun 2012 anak dari Bapak Talu (bapak tengah) saya seorang PNS , Sarjana Hukum; melapor ke Polsek Mandrehe dan menyatakan bahwa Mama Sakhi saya yang selama mengelola kebun karet telah mencuri hasil kebun yang sebenarnya adalah milik saya. Akibat laporan ini Mama Sakhi dan anak laki-lakinya dipenjarakan selama 1 bulan.

Tindakan dari AM merupakan suatu cara untuk menguasai lahan tersebut karena dalam budaya patriarkhi yang berlaku di Pulau Nias, sangat kecil kemungkinan perempuan mendapatkan warisan orangtua sekalipun anak tunggal. Yang berhak hanyalah anak laki-laki; dan jikalau tidak ada saudara laki-laki kandung, maka yang berhak adalah anak laki-laki dari saudara bapak saya.

Hal ini sama sekali tidak membuat saya mundur untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak saya sebagai perempuan. Setelah saya bergabung di PESADA sebagai Pengurus unit Fa'awosa di CU Pesada Faolala Perempuan Nias, banyak diskusi bulanan dan pelatihan yang saya ikuti. Dari pendidikan itu, saya memperoleh banyak pengetahuan mengenai hak-hak perempuan, dan saya bertekad untuk memperjuangkannya. Saya berkonsultasi dengan tokoh-tokoh adat dan tokoh masyarakat; serta dukungan CU PFPN yang membantu memberi solusi bagi saya.

Langkah pertama yang saya lakukan adalah mengurus Surat Keterangan Kepemilikan Tanah untuk menjadi bukti kuat di persidangan bahwa benar saya pewaris dari lahan tersebut. Namun, saya terkejut ternyata sebagian lahan telah AM jual kepada pihak lain tanpa sepengetahuan saya, dan sebagian lagi sudah diakta notariskan AM. Tanah yang tersisa tinggal sebagian lagi, sehingga tanah inilah yang kemudian saya urus Surat Kepemilikan Tanah; dengan ditanda tangani oleh Kepala Desa, Tokoh Adat dan yang berbatas tanah.

Kemudian saya mengajukan surat permohonan ke Polres Nias yang bunyinya agar Mama Sakhi dan anak laki-lakinya dikeluarkan dari penjara (tahanan luar) dan saya bertanggungjawab akan keberadaan mereka selama menjadi tahanan luar. Selanjutnya pengadilan mengeluarkan surat ke Kejaksaan. Surat tersebut saya bawa ke tahanan dan pihak tahanan mengeluarkan surat bahwa keduanya akan menjadi tahanan luar dan harus melapor 1x seminggu selama proses sidang berlangsung.

Sidang dilakukan selama 6 kali selama 2 bulan. Selama sidang saya tinggal di kantor CU Pesada FAOLALA Perempuan Nias. Saya selalu membawa saksi yaitu tokoh masyarakat, tokoh adat, masyarakat sekitar dan keluarga dekat beserta surat keterangan kepemilikan tanah. Mereka menyaksikan bahwa memang betul tanah tersebut adalah tanah warisan orangtua saya, dan membenarkan bahwa sayalah ahli warisnya. Mereka juga menyaksikan bahwa tanah tersebut pernah dihibahkan ayah saya untuk menjadi lapangan sepak bola. Sedangkan yang menjadi saksi AM adalah pihak yang telah membeli tanah tersebut kepada AM dan hal itu tidak dibenarkan oleh tokoh adat dan masyarakat.

Akhirnya dengan bukti yang kuat saya memenangkan perkara tersebut. Pengadilan memutuskan bahwa AM harus mengganti tanah yang telah dia jual. Kemudian sesuai kesepakatan keluarga besar, AM menggantikan tanah tersebut dengan tanah warisan dari orangtuanya beserta rumah yang ada diatasnya. Sebuah pelajaran besar untukku bagaimana panjangnya jalan untuk memperjuangkan hak, dan aku memenangkannya.

"Perubahan Pola Pikir Yang Kritis dan Kepemimpinan Perempuan"

Ditulis oleh: Tika Widya, staf lapang PPSW Sumatra

Namanya Yulia M. Hanis. Seorang perempuan berusia 43 tahun dan tinggal di Jl. Tengku Kasim Perkasa RT 04 RW 04 Rumbai Bukit, Pekanbaru, Riau. Beliau bergabung di PPSW Sumatra mulai tahun 2015 dikelompok koperasi simpan pinjam yang diberi nama Pucuk Rebung Subakti. *"Saya senang bergabung dengan PPSW Sumatra karena begitu banyak perubahan yang saya alami hingga saat ini seperti perubahan pola Pikir yang Kritis, Pengetahuan, Keahlian dan Kepemimpinan perempuan"*, ujar ibu dari 3 orang anak ini. Beliau juga mengatakan *"Banyak organisasi yang saya ikuti, namun berbeda dengan PPSW sumatra"*. Pada saat ini ibu Yulia adalah salah satu pengurus koperasi yang aktif mengikuti Program Penguatan Kepemimpinan Perempuan untuk Pemenuhan Hak Kesehatan Seksual Reproduksi (HKSR) Perempuan bekerjasama dengan Program MAMPU, Konsorsium Permampu dan didampingi oleh PPSW Sumatra di Riau.



Ibu yang akrab di sapa Upit ini sudah banyak membuat perubahan untuk masyarakat terutama dilingkungannya. Terbukti bahwa saat ini ia menjabat sebagai Ketua Koperasi, Ketua RW, aktif di organisasi pertanian, Partai Politik dan Pengurus FKPAR Pekanbaru. Ia juga sudah mulai bisa membuka mata para perempuan yang ada dilingkungannya untuk mengikuti kegiatan diluar rumah seperti Berogranisasi dan berkelompok. Ia juga menyampaikan bahwa betapa pentingnya peran kita sebagai seorang perempuan dan banyak hak-hak kita sebagai seorang Perempuan yang belum dipenuhi oleh Negara. Ibu yang setiap hari bergelut di toko material ini juga bisa meyakinkan kaum laki-laki seperti suami dari anggota kelompoknya untuk bisa mendukung kegiatan istri mereka.

Selama 2 tahun terakhir ia banyak mendapat pelajaran dari PPSW Sumatra, bahwa perempuan harus

belajar dan menjadi tahu. Menurutnya bagaimana perempuan bisa percaya diri yaitu ketika perempuan bisa mandiri secara ekonomi dan berilmu. Setelah banyak mengikuti Pelatihan dari PPSW Sumatra, ia sadar bahwa perempuan sangat berperan dalam kehidupan baik di keluarga, masyarakat, pemerintah. Perempuan juga bisa menjadi seorang pemimpin. Ibu Yulia adalah seorang Ketua RW di lingkungannya. Jabatan yang selama ini lebih banyak dipegang oleh kaum lelaki, dan sekarang menjelang Pemilu tahun 2019 ia sedang mencoba untuk berpartisipasi menjadi calon legislatif Kota Pekanbaru. Semangat kepemimpinannya telah banyak memberikan inspirasi bagi perempuan di lingkungannya sehingga mereka aktif mengikuti kegiatan Koperasi Simpan Pinjam. Setelah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan, Ibu Yulia semakin termotivasi dan percaya diri untuk masuk ke organisasi politik guna meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Semua ini ia lakukan karena ingin mengangkat derajat perempuan agar setara dengan laki-laki dan mendapatkan keadilan gender dalam proses pembuatan keputusan dan kebijakan yang responsive gender. Perempuan harus lebih berdaya agar mampu memperjuangkan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan.

"Mengawali Keluarga Peduli HKSR "

Ditulis oleh: Wira Fajriani, Staf Lapang LP2M Wilayah Kab. Tanah Datar

Program pendidikan HKSR atau berbicara seksual dalam masyarakat bukanlah hal yang mudah, karena masih banyak yang beranggapan hal tersebut tabu untuk dibicarakan, bahkan sampai dianggap tidak sesuai dengan aturan adat dan agama. Merespon hal tersebut, PERMAMPU dan LP2M sebagai anggota melihat bahwa pendekatan pendidikan HKSR harus dimulai dari keluarga. Maka perlu ada contoh nyata sebagai bukti pada masyarakat bahwa ada keluarga yang bisa menerapkan hal tersebut dan bahkan berhasil.



Untuk bisa mendapat contoh tersebut, perlu dilakukan pemantauan dan penilaian terhadap keluarga yang telah menerapkan pendidikan HKSR dalam keluarga.

Dalam memilih Keluarga Peduli HKSR, Permampu telah mendiskusikan dan mengeluarkan draft kriteria umum untuk kemudian didiskusikan secara partisipatif. Kriteria ini sudah dikonsultasikan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat yaitu: (1) Anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak (2) Menikah di usia 20 tahun atau tidak menikah di usia anak/dini (3) Melahirkan di usia >20-35 tahun (4) Jarak anak min. 3 th; usia melahirkan terakhir maks 35 th; jumlah anak maks 4 orang (5) Bukan pelaku kekerasan (6) Memiliki pemahaman tentang HKSR (7) Melakukan pendidikan HKSR dan Gizi dalam keluarga (8) Adanya pembagian peran dalam melakukan pekerjaan rumah tangga (kegiatan domestik) dalam keluarga (9) Memasang/menggunakan alat kontrasepsi (diutamakan laki-laki) (10) Tidak merokok (11) Menanamkan nilai agama dan adat dalam keluarga (12) Memiliki jamban keluarga dan sumber air bersih (13) Memiliki jaminan kesehatan.

Berdasarkan kriteria di atas dilakukan pendataan ke keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria dari

tingkat kelompok (KPUK). Setelah melalui diskusi dan wawancara dengan CO/Kader Lokal maka terpilihlah 14 keluarga yang disebut sebagai calon keluarga peduli HKSR; walaupun dari keluarga yang terpilih tersebut belum memenuhi semua kriteria yang telah ditentukan. Misalnya ada anak yang berusia di atas 20 tahun, jumlah anak lima orang dan bahkan masih hamil anak keenam, suami perokok berat dan juga belum ada pembagian peran yang jelas dalam keluarga. Hal lain yang ditemui juga ada beberapa keluarga yang sebenarnya sudah menerapkan pendidikan HKSR dalam keluarga tetapi kepala keluarganya perempuan. Akhirnya dari 14 keluarga yang sudah didata, LP2M dan FKPAR Provinsi mengkaji ulang dan membandingkan seluruh keluarga tersebut untuk memilih keluarga yang benar-benar tepat dan sesuai dengan kriteria keluarga peduli HKSR.

Dari proses seleksi yang cukup sulit tersebut, terpilihlah Keluarga Pak John dan Ibu Ifatriah yang memenuhi kriteria dibanding kelurga lainnya. Ibu Ifatriah memiliki keluarga yang utuh (suami, ibu/ istri dan tiga orang anak perempuan), menikah di usia 25 tahun, jarak usia anak empat sampai lima tahun, suami istri bukan pelaku kekerasan, suami istri bukan perokok, ada pembagian peran dalam keluarga misal saat ibu Ifatriah pergi mengikuti pelatihan dalam selama dua hari di Padang, urusan rumah tangga dan anak dikerjakan oleh suaminya.

Tidak hanya pembagian peran tentang tugas rumah tangga, pasangan suami istri ini kompak mendidik anak perempuan mengenai pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi. Salah satu contohnya ketika menjelaskan kepada anaknya yang masih duduk di kelas dua SD, siapa saja yang boleh menyentuh bagian tubuh tertentunya. Untuk anak yang sudah memasuki usia remaja mereka berdua menerapkan prinsip saling terbuka antara anak dan orang tua. Menurut ibu Ifatriah jika anak tidak terbuka kepada orang tua, maka itu bisa menjadi awal anak terjerumus ke pergaulan bebas. Pengaruh teknologi saat juga sangat berpengaru. Jika orangtua tidak mengontol dan tidak ada keterbukaan, bisa saja orangtua menyangka anaknya belajar di dalam kamar, padahal mereka sedang asyik menelpon atau sedang membuka situs yang belum tepat. Dengan menerapkan prinsip tersebut, Ibu Ifariah bisa mengawasi penggunaan ponsel anaknya, sehingga mereka yakin anak-anak pun bisa berprestasi di sekolah.

Untuk kriteria penggunaan alat kontrasepsi, keluarga ini mengakui bahwa mereka tidak ber-KB dengan menggunakan alat kontrasepsi, namun menggunakan sistem kalender. Berdasarkan pengamatan kami, informasi penggunaan alat kontrasepsi untuk laki-laki belum banyak diketahui oleh masyarakat. Selama ini yang tertanam dalam pemikiran masyarakat adalah perempuan yang perlu memasang alat kontrasepsi. Selain itu, kriteria penerapan nilai adat dan agama juga masih terlalu luas sehingga perlu ditentukan indikator penerapan nilai adat/agama dalam penentuan Keluarga Peduli HKSR. Untuk tahap awal, Keluarga Peduli HKSR ini sudah cukup memadai sebagai panutan di sekitarnya.

"Dari Mengusik Menjadi Mitra Testimoni Kepala Puskesmas Meranti"

Ditulis oleh Sutiyem, Staf Lapang APM Jambi



Nama saya Asril Parlaungan Naibaho. Sehari – hari orang memanggil saya dengan panggilan dokter Asril. Tinggal di Mentawak Kecamatan Nalo Tantan, 17 km dari kota Bangko yang menjadi ibu kota Kabupaten Merangin. Sejak pertengahan tahun 2016, saya bertugas sebagai Kepala Puskesmas Meranti di Kecamatan Renah Pamenang. Jarak dari rumah ke tempat tugas saya tempuh kurang lebih 1 jam perjalanan dengan medan jalan yang lumayan berlubang dan licin jika kondisi hujan. Pertama tugas di Puskesmas Meranti banyak hal yang harus saya benahi, baik terkait manajemen, pelayanan, maupun personil tenaga medisnya. Saya beruntung sering dilibatkan dalam kegiatan organisasi perempuan APM, bahkan bermitra. Saya terlibat dan mengikuti beberapa kegiatan yang diadakan APM dalam program Mampu; antara lain ikut menjadi FMS, Lokakarya Penyadaran Gender dan HKSR bagi penyedia layanan, audiensi dengan Dinkes, BPMPD, dan Bapeda, Puskesmas Meranti sebagai sasaran lokasi Penelitian Persoalan pemenuhan gizi Perempuan dan Perempuan Muda, diskusi lintas sektor.

Banyak perubahan yang saya rasakan dan alami setelah terlibat dalam kegiatan APM, baik dalam diri, keluarga, maupun di lingkup tempat kerja. Saya semakin termotifasi untuk meningkatkan kualitas diri sebagai seorang pimpinan sebuah institusi yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat terutama kepada perempuan dan anak. Dalam keluarga, terhadap istri saya lebih menghormati dan mendorong dia untuk lebih mandiri. Dari proses pembelajaran bersama APM muncul kesadaran saya, bahwa perempuan selama ini banyak mengalami diskriminasi, tidak saja oleh laki – laki tetapi oleh adat istiadat, agama dan negara. Dalam memimpin Puskesmas, saya menekankan kepada paramedis di jajaran saya untuk melakukan layanan yang berpihak dan ramah kepada pasien terutama perempuan yang memiliki persoalan dan kebutuhan yang berbeda dengan laki- laki.

Dari perubahan tersebut yang paling penting adalah bagaimana saya dan personil di tempat kerja saya dapat meningkatkan layanan kepada masyarakat dan perempuan dengan baik sesuai SPM bidang kesehatan, serta pentingnya melakukan kerjasama dengan seluruh element untuk menuju masyarakat yang sehat. Makanya APM salah satu lembaga yang secara instens dilibatkan oleh Puskesmas dalam setiap minilog lintas sektor. Dulu paramedis di Puskesmas melayani masyarakat hanya sebatas kewajiban, kurang memperhatikan hak – hak mereka sebagai pengguna layanan. Setelah saya sebagai pimpinan Puskesmas dan beberapa dari mereka juga sering terlibat dalam diskusi – diskusi maupun kegiatan APM lainnya, sekarang menyadari bahwa masyarakat terutama perempuan dan perempuan muda harus mendapatkan akses pelayanan yang komprehensip dan sesuai dengan standart dan aturan yang mengikatnya. Bahkan sekarang antara Puskesmas Meranti dan APM sudah menandatangani sebuah kesepakatan tentang pelaksanaan program Kesehatan Peduli remaja, yang salah satu muatannya adalah pelayanan kesehatan reproduksi termasuk edukasi dan pelayanan konseling.

Dari perubahan yang terjadi pada diri dan kinerja di lingkungan institusi saya, berdampak positif pada status Puskesmas. Berkat sinergi dan dukungan APM, Puskesmas Meranti lulus dalam akreditasi dari pusat. Selain itu bidan Desa Puskesmas Meranti dari Desa Pulau Tujuh yang merupakan bidan di klinik Kesehatan Reproduksi Esensial APM menjadi bidan teladan di tingkat kabupaten dan sekarang sedang kompetisi di tingkat propinsi Jambi. Berkat Program HKSR APM banyak sekali membawa perubahan positif di Puskesmas Meranti. Hingga ada satu pimpinan Puskesmas di Kabupaten Merangin yang meminta kepada saya untuk dihubungkan dengan APM agar dia juga diperkenalkan dan dilibatkan dalam kegiatan – kegiatan APM, sehingga dapat menerapkan seperti di Puskesmas Meranti yang saya pimpin ini.

Harapan saya, instansi terkait yang terkadang masih memandang sebelah mata terhadap APM, dapat membuka diri dan mendukung kerja – kerja APM. Jangan merasa terusik dengan keberadaan APM, karena telah saya buktikan sendiri, kritikan yang disampaikan kepada kita justru untuk perbaikan dan peningkatan pelayanan kita kepada masyarakat yang secara otomatis berdampak pada perubahan – perubahan positif lainnya.

"Mengakses Layanan Remaja Melalui PKPR"

Ditulis oleh Eka Fitriani, Staf Lapang CP WCC Bengkulu



Nama saya Ratih Mustika, saya anak kedua dari 2 bersaudara dan usia saya 20 tahun. Saya tinggal dikelurahan Padang Serai Kota Bengkulu. Perubahan yang saya alami adalah mendapat ilmu pengetahuan mengenai Kesehatan Seksual dan Reproduksi Remaja serta dapat mengakses layanan PKPR yang dikhususkan untuk remaja.

Saya adalah seorang mahasiswi di salah satu Universitas Islam Negeri di Kota Bengkulu. Aktifitas sehari-hari yang saya lakukan sebelum kuliah adalah saya membantu ibu mengerjakan pekerjaan rumah. Setelah usia kuliah saya menghabiskan waktu berkumpul dengan teman-teman sekedar ngobrol-ngobrol ringan. Berbicara mengenali tubuh baik perempuan maupun laki-laki bagi saya merupakan hal yang tabu dan tidak pantas untuk dibicarakan, menurut adat budaya keluarga saya yang berasal dari Jawa. Dalam adat istiadat membahas mengenai tubuh perempuan dan laki-laki ini sangat sensitif. Karena adat budaya yang menganggap tabu dalam mengenali tubuh perempuan dan laki-laki membuat saya kurang mendapatkan pengetahuan mengenai Kesehatan Seksual dan Reproduksi Remaja saya masih sangat awam. Karena ketidaktahuan membuat saya merasa bingung ketika saya mengalami masalah tentang Kespro saya. Masalah yang pernah saya alami adalah pada saat menstruasi yaitu tidak teratur terkadang 1 bulan sekali, 2 bulan sekali. Teman saya pun ada yang sering mengeluhkan hal yang sama namun saya tidak bisa menjawab dan bingung untuk menjawab dan ke mana harus konsultasi. Ketika terjadi permasalahan mengenai tersebut saya lebih sering menceritakan keluhan saya itu ke ibu karena menurut saya ibu lebih paham dan sudah pernah mengalaminya. Ibu saya menyarankan untuk berkonsultasi

dengan bidan atau ke Puskesmas, namun dalam pikiran saya jika konsultasi ke Puskesmas pasti akan digabung dengan pasien yang lain dan malu jika harus konsultasi didengar oleh banyak orang.

Pada tahun 2015 program Cahaya Perempuan WCC masuk ke Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dan membentuk kelompok komunitas perempuan muda yang bernama sahabat Remaja. Awalnya saya diajak oleh ketua kelompok untuk bergabung. Pada saat itu saya masih duduk di bangku SMA. Saya sangat tertarik dengan materi yang disampaikan setiap bulannya dengan tema yang selalu berganti-ganti. Melalui Cahaya Perempuan WCC saya mendapat pengetahuan mengenai persoalan Kespro yang selama ini saya belum mendapatkan pengetahuan tersebut baik di bangku sekolah maupun di universitas. Setelah mendapat pengetahuan bahwasanya ilmu mengenali tubuh perempuan & laki-laki itu sangat penting dan membuat saya berubah dari "Tabu menjadi Tahu".

Pada tahun 2017 saya mengikuti kegiatan Pertemuan Forum Perempuan Muda Tingkat Propinsi, kegiatan tersebut diawali dengan melakukan kunjungan ke Puskesmas Pasar Ikan. Disana saya dikenalkan dengan yang namanyanya program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR), salah satu program yang ada di Puskesmas Pasar Ikan yang diperuntukan khusus untuk remaja. Saya baru memahami bahwasanya ada program khusus untuk remaja di Puskemas. Saya mendapatkan penjelasan secara terperinci dari petugas yang memegang program tersebut yaitu Bidan Dita. Program ini sangat bagus untuk remaja karena di program ini juga menyediakan obat jerawat yang rata-rata remaja sangat bermasalah mengenai hal tersebut. Ruangan konseling Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) yang dimiliki oleh Puskesmas Pasar Ikan Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu memiliki ruang tersendiri dengan bentuk ruangan yang tertutup walapun masih sangat kecil, sempit, sedikit berantakan karena dalam tahap renovasi.

Setelah kegiatan tersebut saya bersama dengan 1 orang teman saya mengakses Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKRP) yang ada di Puskesmas Pasar Ikan Kec. Teluk Segara. Prosedur dalam mengakses layanan itu sangat mudah, cepat dan petugasnya ramah. Pada waktu itu yang bertugas sebanyak 2 orang, karena pada saat itu Puskesmas masih masih dalam tahap renovasi sehingga ruangan konseling dialihkan di ruangan kepala Puskesmas. Namun pada saat konseling masih ada orang lain yang bisa masuk ke ruangan sehingga membuat saya kurang nyaman. Saya & teman saya mendapatkan informasi mengenai permasalahan mengenai kespro (catatan: informasi mengenai apa yang dikonsultasikan dirahasiakan oleh si pencerita).

Program kesehatan selama ini banyak difokuskan untuk perempuan dewasa namun dengan adanya program PKPR ini kami remaja juga sudah dapat menikmati layanan kesehatan seksual dan Reproduksi dilembaga penyedia layanan kesehatan. Saya juga telah berkomitmen untuk selalu mengajak saudara, teman dan remaja di lingkungan sekitar untuk dapat mengakses layanan PKPR dan manfaat dalam mengakses layanan PKPR. Harapan saya dengan program PKPR dari segi jam layanan agar dapat ditambah yang dari pukul 14:00 – 15:00 karena kendala diremaja ketika jam operasional Puskesmas mereka masih bersekolah. Semoga semakin banyak lagi remaja yang ikut menikmati program PKPR yang ada di Puskesmas masing-masing.

"Single Parent Tangguh Dari Bilik Kios"

Ditulis oleh: Eka Rizky Agustia, Staf Lapang Damar Lampung



Namaku Nur Fitri. Aku lahir di Bengkulu, 05 Oktober 1972. Aku dikaruniai anugrah 3 orang anak. Sebagai seorang single parent, aku menjadi ibu sekaligus ayah bagi ketiga anakku. Aktivitas sehari-hariku menjaga kios kecil milik orang lain. Hanya menjual dagangan dan berkomunikasi apa adanya dengan para pembeli.

Awal mula aku ikut organisasi, hanya sebatas diajak temanku mengik uti pertemuan kumpulan yang aku belum terlalu faham dengan maksud dan tujuannya. Waktu itu di rumah makan pondok santap.Tak ada bayangan bahwa diriku bisa menyempatkan waktu untuk berkumpul keluar dengan orang banyak, bahkan tak ada bayangan sedikitpun bisa berorganisasi seperti halnya orang-orang penting. Di pertemuan tersebut, kami diberi ilmu tentang gender. Perbedaan laki-laki dan perempuan. Yang memberi hak perempuan untuk berpolitik. Dari situ, aku mengerti bahwa gender adalah bentukan dari masyarakat, gender bukanlah kodrat, atau dari Tuhan.

Pada 2015, aku terlibat pada kegiatan yang diselanggarakan oleh Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR. Ada beberapa kegiatan yang saya ikuti melalui program ini diskusi bulanan, pendidikan politik, pendidikan dasar CU dan magang ke CU Pesada Perempuan di Sidikalang, Sumatera Utara. Menggeluti dunia organisasi membuat hari-hari ku semakin penuh warna dan ilmu. Aku menceritakan aktifitas keorganisasian kepada keluarga dan mereka sangat mendukung untuk aku mengikuti organisasi ini.

Pada tahun 2016, aku terlibat dalam musyawarah wilayah Serikat Perempuan Lampung Selatan (SEPALAS) untuk menentukan kepemimpinan. Disitu nama ku terpilih sebagai ketua bidang ekonomi. Mulai dari situ, aku semakin aktif berorganisasi. Sedikit setelah diberi pengarahan tentang apa yang bakal aku lakukan untuk mengemban amanah organisasi, di posisi itu semakin menjadi faham dan mengerti dengan tanggung jawab yang kuemban. Aku termotivasi mengikuti kegiatan SEPALAS karena sangat menambah pengetahuan dan pengalaman bagaimana caranya berorganisasi saat usia sudah semakin menua. Ternyata, itu membuatku bisa mengisi hari-hari dengan kegiatan yang bermanfaat baik bagi diriku maupun orang sekitarku. Aku menjadi tidak hanya masak, nyuci dan bebenah serta mengurus anak saja.

Setelah aku bisa mengajak para ibu di desa, aku dan teman-teman kader SEPALAS berembuk kebutuhan apa yang cocok dan dapat bermanfaat untuk kita semua hingga akhirnya semua sepakat membentuk kelompok simpan pinjam/CU. CU desa Kalisari berdiri pada Februari 2016, dengan pengetahuan yang minim dari bulan ke bulan berjalan dengan beranggotakan 46 orang.

DAMAR terus melakukan penguatan kapasitas melalui pendidikan-pendidikan dan asistensi. Di bulan Desember 2016, aku mendapat kabar akan difasilitasi magang CU di Sidikalang Medan. Awalnya aku merasa berat, karena harus meninggalkan anak-anakku. Setelah ayahnya meninggal November 2010, aku hanya tinggal bersama ke tiga anakku. Jadi sedikit berat untuk aku pergi ke Medan. Namun anakku bilang

kepadaku bahwa “kami sudah besar, jadi ibu bisa pergi ke Medan untuk menimba ilmu”. Dengan tetesan air mata bahagia karena anak-anakku begitu sangat mendukungku. Akhirnya, aku pergi ke Medan dan menimba banyak ilmu disana. Dibimbing dengan mentor yang kami panggil dengan sebutan kak Uli, disana bersama rombongan kami diajak keliling ke kantor CU di Sidikalang dan bertemu dengan para anggota CU di sana. Setelah pulang dari Medan, aku mulai menerapkan ilmu yang kudapat. Ku mulai pembukuan dan akhirnya menghitung SHU 2016 yang anggotanya bertambah menjadi 49 orang. Setelah pembagian SHU, dari situ anggota CU kami semakin bertambah banyak hingga mencapai 72 orang.

Manfaat yang kudapat selama aku berorganisasi dan menjalan kan CU, otak dan pikiranku terus terasah untuk menimba ilmu. Aku bisa membantu ibu-ibu di lingkunganku tinggal lepas dari jeratan rentenir dan aku bisa terus bersilaturrahmi dengan para tetangga.

VISI KONSORSIUM PERMAMPU

Perempuan mengalami dan menikmati pemenuhan perlindungan dan penghormatan Hak Kesehatan Seksual & Reproduksi (HKSR) yang lebih baik.

TUJUAN 1
Perempuan akar rumput (pedesaan, miskin kota, muda/usia 12-20 tahun mempunyai kekuatan kolektif dan kekuatan ekonomi untuk pemenuhan HKSR).

TUJUAN 2
Perempuan mendapatkan kemudahan akses dalam pelayanan HKSR yang mudah, cepat, tepat dan bermutu.

TUJUAN 3
Institusi keluarga, adat dan agama melakukan perubahan aturan adat dan tafsir agama terkait HKSR (FMS).

TUJUAN 4
Pemerintah Desa dan Kab/Kota membuat kebijakan untuk pemenuhan dan perlindungan HKSR.

WILAYAH CAKUPAN PROGRAM PERMAMPU



SEKRETARIAT PERMAMPU
Jl. Pancur Siwah No 1G Padang Bulan KM 8 Medan 20142 - Sumatera Utara
Telp/Fax. 061-8361102 e-mail : konsorsiumpermampu@gmail.com
www.permampu.org Facebook: PermampuConsurtium